

Representasi Politik Lokal dalam Novel *Tanah Surga Merah* Karya Arafat Nur

Syahrotul Latifah dan Sugiarti

Universitas Muhammadiyah Malang

syahrotull@gmail.com dan sugiarti@umm.ac.id

ABSTRAK

Politik lokal Aceh diangkat sebagai latar belakang dalam novel Tanah Surga Merah dan menjadi titik fokus dalam penelitian ini. Tujuan dalam penelitian yaitu merepresentasikan (1) fakta-fakta politik lokal Aceh; (2) strategi Partai Merah untuk memenangkan suara rakyat Aceh dalam pemilihan umum dewan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode analisis deskriptif. Sumber data penelitian yaitu novel Tanah Surga Merah karya Arafat Nur. Data dalam penelitian ini adalah kutipan dialog, monolog, dan narasi dalam novel Tanah Surga Merah karya Arafat Nur. Analisis dilakukan secara bertahap dengan langkah-langkah meliputi: (1) pembacaan secara kritis terhadap seluruh data dalam novel; (2) penentuan pendekatan dan teori yang relevan; (3) penyajian data yang terdiri atas identifikasi dan klasifikasi data berdasarkan domain masalah, dan (4) penafsiran terhadap seluruh data, serta kesimpulan. Hasil penelitian sebagai berikut (1) fakta-fakta politik lokal dalam novel Tanah Surga Merah Karya Arafat Nur ditemukan adanya dominasi Partai Merah; siasat egoisme partai politik; menuhankan uang dalam setiap alur yang diceritakan; (2) strategi partai merah untuk memenangkan suara rakyat aceh dalam pemilihan umum dewan dilakukan adanya strategi politik uang; strategi politik adu domba; strategi politik muslihat; strategi janji-janji palsu; strategi simpati dengan membawa nama agama, syariat Islam, aulia, dan ulama; pembacaan sumpah pemilihan; kampanye ilegal. Berdasarkan tiga fakta politik local Aceh dan tujuh strategi untuk menarik simpati rakyat dapat disimpulkan bahwa mereka hanya memiliki satu tujuan utama yaitu memenangkan pemilihan umum dengan melakukan segala macam cara agar tujuan tersebut dapat tercapai sesuai dengan kehendak partai.

Kata Kunci: *politik lokal, strategi politik, Partai Merah*

ABSTRACT

Aceh's local politics was adopted as a background in the novel Tanah Surga Merah and became the focal point in this research. The purpose of the research is to represent and describe (1) the facts of Aceh's local politics; (2) Red Party strategies to win the votes of the Acehnese in the council elections. This study uses a sociological approach to literature. The method used in the research is descriptive analysis method. The research data source is the Arafat Nur's Tanah Surga Merah novel. The data in this study are dialogue quotations, monologues, and narratives in Arafat Nur's Tanah Surga Merah novel. The analysis is done in stages with steps including: (1) reading critically and creatively on all data in the novel; (2) determining relevant approaches and theories; (3) presentation of data consisting of identification and classification of data based on the problem domain, and (4) interpretation of all data, and conclusions. The results of the study as follows (1) the facts of local politics in Arafat Nur's Tanah Surga Merah novel found the dominance of the Red Party; political party selfish tactics; menuhankan money in every plot told; (2) the red party strategy to win the votes of Acehnese people in the general election of the board found that in the political flow there was still a money politics strategy; political strategy of bring into conflict; political strategy deception; strategy of false promises; strategy of sympathy by bringing the name of religion, Islamic law, aulia, and ulama; reading the election oath; illegal campaign. Based on the three facts of Aceh's local politics and seven strategies to attract people's sympathy it can be concluded that they only have one main goal, namely to win the general election by doing all kinds of ways so that these objectives can be achieved in accordance with the party's wishes.

Keywords: *local politics, political strategy, the Red Party*

PENDAHULUAN

Karya sastra merupakan sebuah representasi atas realita yang terjadi dalam kehidupan. Realita yang muncul dipandang sebagai faktor dan gejolak terciptanya sebuah karya sastra. Terciptanya sebuah karya sastra pastinya melewati berbagai tahapan yang dilalui oleh pengarang yaitu dengan mengombinasikan antara unsur realita, wawasan pengarang, dan imajinasi yang bersinergi menjadi satu-kesatuan karya. Karya inilah, nantinya yang akan digunakan sebagai bukti adanya realita yang pernah terjadi dalam kehidupan. Seperti tulisan Tainel (dalam Anwar, 2015:20) karya sastra merupakan refleksi dari beberapa fakta yang dapat diketahui selain dari sekedar perasaan-perasaan yang bersifat spesifik di dalamnya.

Karya sastra juga dikatakan sebagai media rekam jejak atas apa yang pernah terjadi dalam kehidupan. Sekarang ini masyarakat sebagai pembuat sastra, pada zaman lampau masyarakat sebagai empunya (Sapardi 2010:vii). Dengan adanya rekam jejak tersebut, masyarakat saat ini dapat mengapresiasi berbagai macam karya sastra yang ada pada zaman lampau yang telah dimiliki sebagai kebudayaan lokal serta berkembang seiring waktu sehingga menjadikan karya sastra lebih

dihormati dan dihargai. Karya sastra yang berkualitas bagi Gramsci (dalam Anwar, 2015:77) adalah karya sastra yang menunjukkan keterlibatan pengarangnya dengan sejarah yang sedang mewujudkan diri. Pada konteks tersebut, Gramsci secara langsung menunjuk kualitas praxis karya sastra maupun sastrawan dalam membentuk kesadaran atau kebudayaan baru.

Dalam novel pengarang dapat merepresentasikan hasil imajinasi yang digabungkan dengan realita yang terjadi di masyarakat. Hasil kombinasi kedua hal tersebut dapat menimbulkan estetika dalam sebuah novel. Estetika ini nantinya menjadi nilai yang dapat dinikmati dan diapresiasi sehingga fungsi novel pun terlihat seperti yang ada pada *Dulce Et Utile* dapat tersampaikan secara benar. Menurut Taine (dalam Anwar, 2015:21), novel secara analog adalah sebuah cermin kecil yang dapat dibawa kemana-mana. Cermin tersebut cocok untuk merefleksikan segala aspek kehidupan dan alam.

Salah satu novel yang menarik untuk diteliti berdasarkan topik representasi politik lokal adalah novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur. Novel ini dibangun dengan gejolak politik lokal di Kota Aceh sebagai pokok cerita. Penggambaran politik lokal disertai dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh menunjukkan ke arah mana karya tersebut dibangun. Kebiasaan-kebiasaan yang digambarkan dalam novel sesuai dengan masyarakat Aceh sebagai daerah otonom yang memiliki kekuasaan tersendiri dengan berpegang teguh pada nilai keislaman. Di balik nilai keislaman yang digunakan sebagai tombak pendirian kekuasaan pemerintah, terdapat banyak fakta dan strategi penyelewengan yang dilakukan oleh penguasa Aceh, yang ditunjukkan ketika akan dilaksanakannya pemilihan umum dewan. Menurut Gramsci, karya sastra yang berkualitas adalah karya sastra yang menunjukkan keterlibatan pengarangnya dengan sejarah yang sedang mewujudkan diri (Gramsci dalam Anwar, 2015: 78). Dengan representasi politik lokal yang dibangun dalam novel disesuaikan dengan sejarah kota Aceh yang memiliki kekuasaan otonom untuk menjalankan sebuah pemerintahan sesuai dengan dasar-dasar islam yang berlaku.

Persoalan politik lokal dikemas oleh Arafat Nur dengan mengkaji dan merekam secara kritis fenomena beserta realita masyarakat Aceh berupa tatanan politik yang dibangun sesuai hak otonom yang dimiliki Provinsi Aceh. Gejolak politik lokal memang menjadi fondasi yang direkam oleh pengarang untuk menggambarkan secara jelas kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh dalam praktik perpolitikan. Menurut Sugiarti (2017:112) tata kelakuan yang kekal akan berintegrasi dengan pola-pola perilaku masyarakat, hal ini merujuk pada kebudayaan yang ada dalam suatu daerah dan berkembang seiring dengan pola tatanan masyarakat yang ada dalam daerah tersebut. Melihat realitas politik lokal yang dituangkan dalam novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur, maka permasalahan yang akan diteliti mencakup dua hal yaitu: (1) fakta-fakta politik lokal Aceh; (2) strategi Partai Merah untuk memenangkan suara rakyat Aceh dalam pemilihan umum dewan.

Salah satu bentuk organisasi politik adalah partai politik. Partai politik merupakan salah satu ajang untuk mewujudkan demokrasi dalam suatu tata negara. Demokrasi sebagai pengembang adanya

partisipasi masyarakat untuk menentukan seorang penguasa yang akan memimpin suatu wilayah. Menurut Sukaharja (dalam Haniya, 2017:11) Demokrasi tanpa partai politik akan kehilangan maknanya, sehingga partai politik menjadi instrumen penting dalam berdemokrasi.

Sebagai upaya untuk merepresentasikan adanya politik lokal yang terdapat dalam novel *Tanah Surga Merah*, penulis menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Sosiologi sebenarnya merupakan ilmu yang mempelajari manusia sebagaimana yang ditemukan dan dialami secara langsung dalam kenyataan keseharian kehidupan. Sosiologi merupakan wilayah kajian yang menyangkut masyarakat dan kebudayaan yang berkembang di dalamnya, termasuk dalam tataran sosial, ekonomi, politik yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu lingkup kajian pendekatan sosiologi sastra, menurut Sapardi (dalam Faruk, 2015:5) yaitu (1) konteks sosial pengarang; (2) sastra sebagai cermin masyarakat; (3) fungsi sosial sastra. Berdasarkan ketiga hal tersebut yang paling menjadi perhatian adalah: (a) sejauh mana sastra dapat berfungsi sebagai perombak masyarakatnya; (b) sejauh mana sastra hanya berfungsi sebagai penghibur saja; dan (c) sejauh mana terjadi hubungan sintesis antara perombak masyarakat dan sebagai penghibur. Sastra sebagai perombak masyarakat khususnya dalam lingkup sosiologi, banyak kawasan yang dapat dijadikan objek kajian seperti ranah sosial, politik, dan kemasyarakatan.

Perubahan sosial juga mengacu pada sistem perpolitikan yang ada pada suatu daerah. Di setiap daerah, sistem perpolitikan yang dijalankan memiliki aturan dan ikatan yang berbeda, karena setiap daerah memiliki sejarah pembentukan dan kebudayaan masing-masing. Politik lokal yang dideskripsikan dalam novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur menceritakan sebuah gejolak partai politik untuk memenangkan sebuah pemilihan umum dewan yang akan segera dilaksanakan. seperti dalam tulisan Sugiarti (2015:234) dalam konteks perubahan sosial, manusia sebagai individu menjadi pusat gagasan dalam terciptanya perubahan. Dalam gagasan perubahan sosial dan historis dapat ditekankan pada suprastruktur dan ideologi.

Realita buruk dalam perpolitikan yang ada di Kota Aceh menyebabkan banyak permasalahan yang terkait dengan fakta-fakta politik lokal dan strategi Partai Merah untuk memenangkan suara rakyat Aceh dalam novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur. Fakta-fakta politik yang diterapkan Partai Merah memang jauh dari kata manusiawi karena dilaksanakan dengan penuh pemaksaan dan ancaman. Sedangkan strategi Partai Merah untuk menarik simpati rakyat, yaitu mengatasnamakan Tuhan dan Syariat Islam sebagai basis kekuatan Partai Merah.

Tanah Aceh merupakan sebuah provinsi yang diliputi banyak konflik. Sebagian besar masyarakat Aceh ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan gerakan yang sejalan dengan tujuan mereka yaitu Gerakan Aceh Merdeka. Menurut Hamid (2013:8) pada tanggal 4 Desember 1976 muncul gerakan ideonasionalisme Aceh Merdeka. Gerakan ini menuntut pemisahan diri dari Republik Indonesia yang dipimpin oleh Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro. Cita-cita gerakan ini yaitu mendirikan negara atau Kerajaan Aceh Sumatera. Benang merah adanya ideologi gerakan ini merujuk pada perspektif historis bahwa Aceh tidak pernah dijajah oleh

Belanda atau sultan Aceh tidak pernah menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Belanda. Oleh karena itu, penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia, seharusnya tidak termasuk wilayah Aceh. Berdasarkan adanya spekulasi tersebut, rakyat Aceh mendirikan suatu organisasi untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, gerakan tersebut diberi nama Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Gerakan ini menjadi ancaman atas terpecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga diadakan nota kesepahaman antara GAM dan NKRI yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 (Akbar dan Mujibussalim, 2017:3). Adanya nota kesepahaman tersebut, Aceh diberikan wewenang untuk menjalankan pemerintahan sesuai hak otonomi sesuai kebudayaan Aceh.

Dalam gejolak perpolitikan, tidak semua provinsi di Indonesia memiliki hak otonom untuk menjalankan politik lokal. Hak otonomi ini diberikan kepada provinsi yang memiliki keistimewaan dikarenakan perjuangan dan kebudayaan, seperti yang diberlakukan pada provinsi Aceh dengan penggantian nama menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikarenakan adanya bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial ekonomi dan politik di Aceh secara berkelanjutan pemulihan kembali kehidupan masyarakat menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat dari keterpurukan yang dialami Aceh selama 32 tahun berkonflik ditambah dengan bencana Tsunami Aceh pada tahun 2004 (Akbar dan Mujibussalim, 2017:3).

Teori politik lokal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (2014:107-109) dalam Bahrum, 2016:142) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Bab XI tentang Partai Politik Lokal Bagian Pertama pada Pasal 75 poin (1) menjelaskan bahwa penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal dan pada poin (4) dijelaskan bahwa kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di Ibukota Aceh. Dalam novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur, menceritakan tentang politik lokal yang sedang dialami Kota Aceh mendekati pemilihan umum dewan pada 9 April 2014. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2007 dijelaskan bahwa partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh yang secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara. (UU RI, 2014:11-12 dalam Bahrum, 2016:143).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut khusus mengatur tentang otonomi daerah Aceh bahwa penduduk Aceh dapat membentuk partai lokal oleh warga sekurangnya 50 Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dan berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan perwakilan perempuan sekurangnya 30%. Partai lokal itu sendiri adalah organisasi politik yang didirikan atas dasar persamaan cita-cita, nilai, dan orientasi yang sama dalam lingkup kedaerahan. Partai politik lokal dibentuk sebagai wadah dalam menghimpun aspirasi masyarakat daerah (Akbar dan Mujibussalim, 2017:7).

Fakta-fakta yang terjadi dalam perpolitikan lokal Aceh, menimbulkan adanya praktik politik dengan menggunakan strategi untuk menarik simpati rakyat Aceh dalam pemilihan umum dewan.

Salah satu bentuk fakta perpolitikan lokal Aceh yaitu berkuasanya Partai Merah sebagai partai yang mendominasi roda politik di Aceh, khususnya di Kota Lamholk sebagai latar tempat cerita dalam novel. Fakta-fakta politik lokal dan strategi untuk menarik simpati rakyat digunakan sebagai ajang untuk menjalankan sistem demokrasi sesuai dengan hak otonom yang telah diberikan pemerintah RI kepada Provinsi Aceh yang telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan teori politik lokal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Politik Lokal di Kota Aceh. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fakta-fakta politik lokal Aceh dan strategi Partai Merah untuk memenangkan suara rakyat Aceh dalam pemilihan umum dewan. Sumber data penelitian ini adalah novel *Tanah Surga Merah*. Data dalam penelitian berupa kutipan dialog dan narasi dalam novel *Tanah Surga Merah*. Analisis dilakukan secara bertahap dengan langkah-langkah meliputi: (1) pembacaan secara kritis dan kreatif terhadap seluruh data dalam novel; (2) penentuan pendekatan dan teori yang relevan; (3) penyajian data yang terdiri atas identifikasi dan klasifikasi data berdasarkan domain masalah, dan (4) penafsiran terhadap seluruh data, serta kesimpulan.

PEMBAHASAN

Sistem politik di Indonesia mengedepankan sistem demokrasi untuk mendapatkan kekuasaan juga menjalankan aspirasi masyarakat dengan wadah berupa pemilihan umum. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memperoleh pemimpin dalam mengatur suatu tatanan wilayah. Partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh. Berdasarkan hal tersebut berikut fakta-fakta dan strategi politik berdasarkan tata aturan politik lokal Aceh.

Fakta-fakta Politik Lokal dalam Novel Tanah Surga Merah Karya Arafat Nur

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang politik lokal Aceh menegaskan bahwa Aceh telah memiliki hak otonom untuk mendirikan sebuah sistem perpolitikan sendiri yang tetap disesuaikan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian hak otonom tersebut oleh pemerintah pusat pada provinsi Aceh, dimanfaatkan oleh penduduk Aceh untuk mendirikan suatu partai politik lokal yang disesuaikan dengan kebudayaan dan tatanan sosial yang ada di masyarakat Aceh.

“Suardin menjadi wali kota atas dukungan penuh Partai Merah yang selalu menenangkan pemilihan umum setelah pemberontakan berdamai dengan pemerintah. Orang-orang Suardin dan orang-orang Partai Merah, selain menduduki semua

jabatan penting di pemerintahan daerah, mereka juga ada di mana-mana seperti hama walang sangat mengerubungi tanaman padi yang sedang berbuah. Itulah sebabnya aku terpaksa melarikan diri sejauh-jauhnya dari tanah yang kucintai ini.” (Nur, 2016:13).

Berdasarkan kutipan tersebut, fakta politik yang nampak yaitu Suardin dapat menjadi Wali Kota Lamholk, Aceh karena dukungan Partai Merah, yaitu partai yang berkuasa di wilayah Aceh. Partai ini menjadi partai dominasi yang anggotanya hampir semua berada di kursi dewan. Hal tersebut menandakan bahwa fakta politik lokal di Aceh, yaitu terpaku pada satu partai besar yang mendominasi di wilayah tersebut. Dominasi partai merupakan hal yang lumrah terjadi di Kota Aceh. Dominasi partai muncul disebabkan adanya latar belakang Kota Aceh sebagai kota konflik yang memiliki gerakan yaitu Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan ini telah mendirikan sebuah partai yang dijuluki Partai Merah. Seperti terlihat dalam kutipan, Partai Merah berhasil menduduki hampir semua kursi jabatan dewan yang ada di Kota Aceh.

“Bagaimanapun juga *Partai Merah sangat berkuasa saat ini dengan pengikut dan pendukungnya dari kota sampai ke pelosok*. Partai terkaya, dan orang-orangnya menduduki jabatan penting di pemerintahan; apa yang bisa dilakukan partai lain? Mereka menguasai dan mengendalikan kekuasaan begitu besar, tanpa memberikan ruang sedikitpun bagi partai lain untuk bergerak. Pengawasan pihak berwenang yang memantau agar pemilihan umum berlangsung jujur dan adil, sama sekali tidak berjalan sebagaimana mestinya.” (Nur, 2016:136)

Berdasarkan kalimat *Partai Merah sangat berkuasa saat ini dengan pengikut dan pendukungnya dari kota sampai ke pelosok* mengindikasikan bahwa dominasi partai masih menjadi fakta perpolitikan yang ada di Kota Aceh. Dijelaskan juga bahwa Partai Merah saat ini sangat berkuasa dengan pengikut dan pendukungnya dari kota sampai ke pelosok daerah. Adanya dominasi partai menandakan bahwa masih ada kesenjangan sosial yang terjadi. Terlihat pula dalam kutipan bahwa dalam Partai Merah berisi orang-orang kaya dan mendapat jabatan penting dalam pemerintahan.

Partai-partai yang mengikuti pemilihan umum, pastinya memiliki tujuan untuk menduduki kursi dewan dengan anggota sebanyak-banyaknya. Hasil pemilihan ini, berdasarkan atas voting masyarakat terhadap partai tersebut. Maka dari itu setiap partai, memiliki siasat dan strategi tersendiri untuk memperoleh jabatan di kursi dewan. Seperti terlihat dalam kutipan berikut.

“Namun, negeriku ini sudah *dirusak tangan-tangan penjajah dan pemimpin bodoh* sehingga bagaimanapun petani bekerja keras, mereka tak akan pernah bisa hidup makmur. Para pengendali kekuasaan terus mengusik rakyat, membuat rusuh demi siasat dan intrik politik tak ada suatu upaya pun yang dilakukan pemerintah demi kemakmuran rakyat, semuanya demi kepentingan mereka.” (Nur, 2016:123).

Kalimat *dirusak tangan-tangan penjajah dan pemimpin bodoh*, gejala perpolitikan Kota Aceh ternyata sebenarnya meniru adanya perpolitikan yang telah ditunjukkan oleh penjajah. Penjajah yang pernah singgah di Indonesia hanya memanfaatkan tenaga dan potensi alam yang dimiliki Negara Indonesia semata-mata hanya untuk kemakmuran mereka. Sistem yang demikian, rupanya juga menjadi sistem perpolitikan di Kota Aceh yang melakukan siasat dan taktik hanya untuk kepentingan partai saja, tidak pernah mengatasnamakan kepentingan rakyat atau apapun. Fakta perpolitikan Aceh yang terlihat berdasarkan kutipan tersebut yaitu siasat egoisme partai dalam melaksanakan sistem perpolitikan. Sistem pada partai politik hanya melihat pada kepentingannya saja, tanpa melihat kepentingan sebenarnya yang dibutuhkan oleh rakyat. Kesenjangan sosial juga nampak pada fakta ini, yaitu hanya orang-orang yang berada di pihak partai saja yang mendapat perlindungan dan kekuasaan sedangkan yang lain, tidak mendapatkan apa-apa.

“Mereka hanya berani bersikeras dan menekan kaum sendiri. Inilah bangsa hebat yang paling agung dan paling mulia di atas bumi.” (Nur, 2016:35).

Dalam kutipan *mereka hanya berani bersikeras dan menekan kaum sendiri*, terlihat bahwa orang-orang Partai Merah hanya berani dan menindas kaum sendiri. Partai Merah hanya dapat berlaku semena-mena terhadap warga Aceh sendiri. Fakta politik lokal berdasarkan kutipan yaitu strategi egoisme Partai Merah yang menindas kaum sendiri, padahal secara nyata Partai Merah mengatakan bahwa Aceh merupakan daerah paling agung dan paling kuat karena berasaskan syariat Islam ketika pelaksanannya. Siasat yang dilakukan Partai Merah dengan menindas kaum sendiri, maksudnya yaitu mengerahkan segala perbuatan, berupa ancaman, gangguan, dan penindasan hanya untuk kepentingan kemajuan partai saja, tanpa melihat siasat yang dilakukan manusiawi atau tidak.

“Orang-orang yang dulu berteriak-teriak demi kemerdekaan, demi martabat, dan demi Aceh yang hebat, justru merekalah yang merusaknya. Kekuasaan di tangan mereka bukannya membuat Aceh semakin baik. Aceh masih jauh lebih bagus ketika masih berada di bawah pemerintahan sebelumnya, sekalipun dikuasai orang-orang yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah Jakarta.” (Nur, 2016:51).

Orang terdahulu serius dalam memperjuangkan kemerdekaan Aceh terus mengatakan dan percaya bahwa Aceh nantinya akan menjadi wilayah yang hebat. Namun, orang terdahulu yang pernah memerdekakan Aceh, malah merusaknya. Kursi kekuasaan yang mereka duduki, jabatan yang mereka pegang, tidak membuahkan hasil apapun. Masyarakat semakin merasa tertekan dan tertindas. Fakta perpolitikan dalam kutipan ini yaitu Orang-orang partai hanya bekerja

sesuai dengan kepentingan partai saja, tanpa melihat kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat seakan kepentingan yang kesekian. Padahal, berhasilnya kepemimpinan suatu wilayah, dilihat dari kemakmuran masyarakatnya.

“Kami kerap bertemu di kedai kopi Lamholk, pastinya sebelum aku menembak mati Jumadil dan aku masih bergabung dengan Partai Merah yang terbentuk sesudah itu. Lama setelahnya, kami sudah mulai tidak sepaham dengan orang-orang Partai Merah yang melenceng dari garis perjuangan. *Partai hanya dijadikan kendaraan untuk merebut kekuasaan, bukan memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat.* Terlebih lagi, banyak perilaku mereka yang tidak berakhlak dan sama sekali tidak punya adab.” (Nur, 2016:134)

Murad sebagai seorang mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka memutuskan untuk keluar dalam keanggotaan Partai Merah karena orang-orang partai Merah yang sudah tidak sepaham dengan tujuan awal pembentukan partai. Mereka melenceng dari garis perjuangan yang selama ini telah digagas dan diperjuangkan. Partai hanya dijadikan sebagai kendaraan untuk merebut kekuasaan, bukan untuk memperjuangkan hak rakyat. Fakta perpolitikan yang terdapat dalam kutipan tersebut yaitu siasat egoisme Partai Merah dalam melakukan segala cara hanya untuk kepentingan orang-orang partai saja, tanpa melihat dan memperjuangkan hak serta kepentingan rakyat. Disebutkan pula dalam kutipan, bahwa perilaku orang-orang Partai Merah yang tidak memiliki akhlak dan sama sekali tidak punya adab.

Pemilihan umum memang lumrah dilaksanakan pada negara yang memiliki sistem demokrasi dalam pelaksanaannya. Seperti pada negara-negara maju, sebagian aturan pemerintahannya menggunakan sistem presidensiil dengan sebuah partai yang menaunginya. Seperti dalam pemilihan ketua dewan. Ketua dewan dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang telah dilaksanakan oleh seluruh masyarakat sebagai ajang penyampaian aspirasinya.

“*Tak ada yang bisa menduga arah politik sesat ini, bahwa lelaki yang sangat bebal itu bisa terpilih sebagai anggota dewan, bahkan anggota dewan memilihnya sebagai Ketua Dewan, dan sampai sekarang dia masih menduduki jabatan penting itu.*” (Nur, 2016:138).

Adanya pemilihan umum dalam menentukan kepala dewan, memang telah dilaksanakan. Aspirasi rakyat secara gamblang juga telah disalurkan. Namun, dibalik itu semua dalam satu komplotan Partai Merah, sebelumnya telah ditentukan siapa yang akan menjadi kepala dewan, sehingga seluruh anggota Partai Merah akan memberikan suara kepada calon yang terpilih dalam forum Partai Merah tersebut. Pemilihannya pun tanpa melihat kecakapan calon ketua dewan yang nantinya akan mengemban amanah untuk memimpin Kota Lamholk, Aceh. Orang-orang Partai Merah hanya berpikir bahwa seluruh jabatan yang ada di Aceh, harus diduduki oleh orang-orang Partai Merah. Fakta

perpolitikan Aceh yang nampak berdasarkan kutipan tersebut yaitu sistem pemilihan umum yang telah disetting atau penataan sistem sesuai dengan keuntungan Partai Merah. Pemilihan umum yang dilaksanakan hanya sebagai formalitas saja untuk cap sebagai daerah yang telah melaksanakan aspirasi rakyat, namun dibalik itu ketua dewan telah diketahui sebelumnya, pasti berasal dari dominasi partai yang berkuasa pada saat itu.

“Dulu, aku begitu mendukung Partai Merah, tapi kecewa. *Selama mereka duduk di pemerintahan, malah keadaan rakyat makin sengsara.* Mereka itu orang-orang bodoh yang tidak bersekolah, dan tidak pernah mau belajar,” ucapnya dengan raut wajah kesal.” (Nur, 2016:173).

Kalimat *Selama mereka duduk di pemerintahan, malah keadaan rakyat makin sengsara*, dahulu banyak warga yang sangat mendukung Partai Merah, karena berdasarkan hasil pembentukannya, Partai Merah ini digagas oleh mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka yang menginginkan perjuangan rakyat Aceh untuk dihargai. Akan tetapi, kekuasaan telah membutakan mereka, para wakil dewan menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki dan membuat rakyat semakin sengsara. Salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya ilmu pengetahuan yang harus dimiliki ketika menjadi pejabat wakil dewan. Banyak tata krama dan aturan-aturan yang harus diterapkan oleh wakil dewan, namun orang-orang Partai Merah adalah orang yang bodoh, mereka hanya menginginkan jabatan dan uang saja tanpa melihat seberapa besar pertanggungjawaban yang akan diminta oleh Tuhan kelak atas apa yang mereka perbuat. Fakta perpolitikan yang terlihat dalam kutipan yaitu penyelewengan yang dilakukan Partai Merah dalam melaksanakan sistem pemerintahan. Akibat dari hal ini sangat jelas, rakyatlah sebagai imbas yang paling besar, karena pemerintahan sebenarnya tidak akan bergerak, apabila tidak ada rakyat di dalamnya. Kepentingan dan kesejahteraan rakyat harus diangkat, karena rakyatlah yang sebenarnya penggerak adanya pemerintahan dan wakil dewan yang duduk di pemerintahan sebagai wakil atau wali penyampaian aspirasi rakyat.

“Aku juga tidak yakin. Semua partai itu omong kosong. Apa pun yang mereka katakan sumpah-sumpah, membawa-bawa ayat Quran; *tujuan utamanya hanyalah untuk kepentingan pribadi dan golongan.* Aku tidak yakin mereka berjuang untuk rakyat. Sampai kiamat pun aku tak bakal pernah bisa percaya!” (Nur, 2016:173).

Partai yang membawa-bawa nama al-Qur'an sebagai tujuannya hanyalah omong kosong. Hal tersebut dilakukan hanya untuk menarik simpati masyarakat agar Partai Merah dicap sebagai Partai Tuhan. Namun, dalam pelaksanaannya tindakan yang demikian hanya digunakan sebagai kepentingan golongan partai saja. Fakta perpolitikan yang terdapat dalam kutipan tersebut yaitu membawa nama Tuhan dalam politik yang pelaksanaannya sangat bertolak belakang dengan ajaran Tuhan. Nama Tuhan hanya digunakan Partai Merah sebagai

penarik simpati saja untuk meyakinkan rakyat agar rakyat menancapkan paku pilihannya pada partai berwarna dasar merah tersebut.

”Aku mengangguk-angguk pelan, berpikir bahwa ada suara rusak yang berasal dari rumah ini pada pemilihan umum mendatang. *Penipuan yang berlarut-larut dilakukan pemerintah membuat rakyat sulit percaya.* Untuk menyelamatkan kertas suara agar memiliki satu lubang yang tepat, maka yang dibutuhkan adalah uang. Maka, partai terkayalah yang bakal menang!” (Nur, 2016: 183)

Berdasarkan kalimat *Penipuan yang berlarut-larut dilakukan pemerintah membuat rakyat sulit percaya*, penipuan dan janji-janji yang sering dikatakan Partai merah untuk membuat rakyat percaya sepertinya sudah tidak berlaku lagi, saat ini yang dibutuhkan yaitu membeli suara. Uanglah yang berkuasa saat ini. Orang-orang Partai Merah mengatakan bahwa dengan memilih partai ini maka rakyat akan selamat, dikarenakan menurut mereka Partai Merah adalah Partai Tuhan yang mengatasnamakan syariat Islam dan Al-Quran sebagai landasan mereka. Namun sebenarnya yang menjadi Tuhan mereka yaitu uang, karena mereka dapat membeli apapun dengan uang bahkan nyawa sekalipun. Fakta perpolitikan yang ada dalam kutipan tersebut yaitu siasat penyelewengan mereka dengan menggunakan uang sebagai Tuhan Partai Merah. Mereka melakukan segala cara dengan uang agar seluruh pemilihan umum dapat dimenangkan oleh partai Merah, sehingga Partai Merah tetap masih berkuasa dan tetap menjadi partai dominan di Aceh.

Strategi Partai Merah Untuk Memenangkan Suara Rakyat Aceh Dalam Pemilihan Umum Dewan

Pesta demokrasi sudah lumrah terjadi di negeri ini yang menandakan bahwa negeri ini mengedepankan asas demokrasi sebagai cara penunjukan pemimpin baru. Demokrasi memang dilaksanakan dengan sangat meriah dalam wadah pemilihan umum yang biasa disebut dengan pesta demokrasi. Namun dibalik itu siapa sangka hal apapun dapat dilakukan untuk memenangkan suara rakyat. Strategi yang dilakukan oleh partai politik secara umum memiliki tujuan utama yakni memperoleh suara terbanyak ketika pemilihan dan partai tersebut dapat menduduki kuota terbanyak dalam kursi anggota dewan.

“Kalau Aceh ingin merdeka, kemenangan Partai Merah kali ini haruslah mutlak, tidak boleh ditawar-tawar, jangan berikan kesempatan pada partai lain. *Hanya Partai Merah sajalah yang mampu memperjuangkan nasib bangsa kita, yang akan membawa Aceh pada puncak kejayaan di masa mendatang. Partai lain hanya memperjuangkan kesenangan mereka sendiri, tak lebih dari itu.*” (Nur, 2016: 142).

Berdasarkan kutipan tersebut, dalam ranah pemilihan umum dewan yang akan digelar di Kota Aceh, setiap partai politik pasti akan

menunjukkan strategi untuk menarik simpati rakyat. Dalam novel *Tanah Surga Merah*, penyuluhan dan kampanye dilakukan oleh Partai Merah dengan gaya politiknya yang nyentrik. Politik yang dilakukan oleh Partai Merah untuk menarik perhatian masyarakat yaitu menggunakan politik adu domba, seperti dalam kalimat *Hanya Partai Merah sajalah yang mampu memperjuangkan nasib bangsa kita, yang akan membawa Aceh pada puncak kejayaan di masa mendatang. Partai lain hanya memperjuangkan kesenangan mereka sendiri, tak lebih dari itu*. Saat itu, sosok Ahmadi yang sedang berorasi di depan masyarakat kabupaten dengan memberikan gambaran buruk untuk partai lain, agar masyarakat tersugesti untuk memberikan suara pada Partai Merah.

“Jika sampai kalah, maka perjuangan orang-orang Aceh terdahulu yang berpuluh-puluh tahun itu tidak ada lagi artinya. Dewan dan pemerintahan akan diduduki oleh orang-orang yang tidak mau memikirkan Aceh. *Mereka orang-orang lemah yang hanya mementingkan diri sendiri*. Coba katakan, apa tujuan mereka buang-buang uang untuk bisa jadi anggota dewan?!” (Nur, 2016: 145).

Pada kalimat *mereka orang-orang lemah yang hanya mementingkan diri sendiri*, banyak calon penguasa yang bisanya hanya menjelekkan partai lain, tanpa melihat dirinya sendiri terlebih dahulu, apakah partai yang dianutnya telah benar secara keseluruhan. Banyak penguasa yang hanya melakukan segala cara tanpa menimbang baik buruknya untuk masyarakat dan generasi penerus bangsa. Mereka telah haus akan kekuasaan dan uang.

“Kalian semua harus memberikan suara untuk Partai Merah, sebagaimana yang kalian ketahui, ini adalah partai Tuhan! *Hanya partai inilah yang peduli agama, menegakkan syariat Islam, dan memperjuangkan penderitaan rakyat Aceh dari penjajahan kaum tidak taat agama, serta untuk kita menghindarkan diri dari mereka yang menganut agama macam-macam*.” (Nur, 2016: 144).

Kalimat *hanya partai inilah yang peduli agama, menegakkan syariat Islam, dan memperjuangkan penderitaan rakyat Aceh dari penjajahan kaum tidak taat agama, serta untuk kita menghindarkan diri dari mereka yang menganut agama macam-macam*, seakan Partai Merah merupakan partai yang paling benar adanya, tapi memang demikian, apabila ada seorang yang tidak setuju dengan sistem pemberlakuan Partai Merah, telah dijamin polisi, tantara, pemerintah, serta media pun akan berusaha untuk mencari sang pemboikot dan dijatuhi hukuman mati. Politik muslihat juga digunakan sebagai realita berpolitik dalam novel *Tanah Surga Merah*. Para calon penguasa hanya memberikan janji-janji manis yang belum pasti apakah terlaksana atau tidak. Muslihat ditambah dengan omongan yang super besar digunakan pula oleh Partai Merah untuk memberikan sugesti kepada masyarakat Aceh untuk terus memberikan dukungan hanya untuk Partai Merah. Ditambah dengan membawa Syariah Islam dan kebenaran Tuhan juga

digunakan sebagai muslihat politiknya.

“Tentara dan polisi sudah habis tugas di aceh, sekarang mereka hanya jadi penonton tentang apa yang terjadi selanjutnya, sebab pemerintah pusat pun mendukung gerakan membabi buta partai ini untuk merusak Aceh, tanpa perlu melibatkan senjata yang sisa pelurunya tidak terlalu banyak lagi setelah embargo senjata yang cukup lama dari Amerika.” (Nur, 2016: 143).

Pada kalimat *tentara dan polisi sudah habis tugas di aceh, sekarang mereka hanya jadi penonton tentang apa yang terjadi selanjutnya*, tidak hanya rakyat sebagai sasaran politik, namun pihak kepolisian dan tentara juga digunakan sebagai sasaran untuk mendukung partai yang telah mendominasi di wilayah Aceh. Seakan pemerintah telah mendukung adanya gerakan-gerakan penuh kepalsuan yang dilakukan selama ini. Gerakan kepalsuan itu berupa strategi politik uang yang digunakan untuk menutup mulut pihak kepolisian, tentara, dan media. Mereka seakan buta terhadap keadaan rakyat yang semakin sengsara karena politik lokal yang dilaksanakan hanya berpihak pada satu pihak saja, yaitu anggota serta siapapun yang mendukung dominasi Partai Merah.

“Sebetulnya, pemilihan kepala daerah yang berlangsung April 2012 lalu, kepercayaan rakyat terhadap Partai Merah sudah jauh menurun. Namun, yang membuat mereka mendulang suara terbanyak adalah kerja mesin politik yang masih sangat baik, berikut tekanan, ancaman, dan terror. Mesin ini pula yang mulai digerakkan kembali sekarang, berusaha menghambat apa pun gangguan yang merugikan mereka sehingga kepulanganku pun sudah mereka perkirakan.” (Nur, 2016:61).

Partai Merah sebenarnya telah kehilangan kepercayaan dan simpati dari rakyat Aceh, namun yang membuat Partai Merah tetap menjadi partai dominasi di aceh yaitu kerja sistem politik yang masih sangat baik. Strategi politik yang digunakan untuk terus mengangkat nama Partai Merah yaitu dengan terror, ancaman, tekanan kepada setiap masyarakat agar terus memberikan suara pada saat pemilihan dewan, seperti dalam kalimat *kerja mesin politik yang masih sangat baik, berikut tekanan, ancaman, dan terror*. Antek-antek yang dimiliki oleh Partai merah sangatlah banyak, karena anggota Partai Merah tersebar diseluruh wilayah Aceh. Seperti dalam kutipan bahwa Murad yang akan kembali ke Kota Lamholk pun telah diperkirakan dan pastinya Partai Merah telah menyiapkan strategi untuk menangkap Murad dalam keadaan hidup atau mati.

*“Bagaimana gerakan orang-orang Partai Merah di sini?”
tanyaku lagi*

“Jauh sebelum waktu kampanye resmi dijadwalkan, mereka sudah memulai kampanye liar dan terang-terangan, mengatasnamakan dakwah agama. Nanti malam kita bisa

menyaksikannya di lapangan!” (Nur, 2016:136)

Kalimat *mereka sudah memulai kampanye liar dan terang-terangan* tersebut disebutkan bahwa Partai Merah sebagai partai dominasi tidak ingin kehilangan waktu sedikitpun untuk menarik simpati rakyat. Terlihat bahwa mereka melakukan kampanye sebelum waktu kampanye resmi dijadwalkan. Hal ini termasuk dalam tindakan yang ilegal, karena tidak sesuai jadwal resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Strategi yang digunakan Partai Merah untuk menarik simpati rakyat Aceh yaitu dengan melakukan tindakan ilegal dan berdakwah membawa syariat Islam.

“ini kesempatan yang diberikan Allah untuk memperbaiki nasib rakyat Aceh yang telah lama dijajah oleh orang-orang yang tak jelas agamanya. Kita bangsa besar di dunia, dan kita harus bisa menolong diri kita sendiri. *Jangan terlalu berharap pengakuan Amerika dan inggris, mereka orang kafir, mereka tidak mungkin mendukung kita!*” (Nur, 2016:144).

Ketika Partai Merah berkampanye, mereka menggunakan strategi politik muslihat dengan menjelek-jelekkkan agama lain seperti dalam kalimat *Jangan terlalu berharap pengakuan Amerika dan inggris, mereka orang kafir, mereka tidak mungkin mendukung kita*. Hal tersebut ditujukan kepada para penjajah, namun Partai Merah tidak melihat bahwa di Negara Indonesia terdiri atas multiagama dan disatukan dengan adanya nilai Pancasila. Apabila Partai Merah berasaskan Syariat Islam, pastinya harus selalu menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati antar agama, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Namun berdasarkan kutipan, mereka juga mengkafirkan umat agama selain agama Islam.

“*Bukan ekonomi rakyat yang perlu kami pikirkan, tapi yang paling penting di atas segala-galanya adalah perjuangan untuk pengesahan bendera merah* kita yang selalu menemui jalan buntu. Bendera adalah segala-galanya, tanpa itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jika bendera kita sudah berkibar, maka segalanya akan bisa tercapai, ekonomi dengan sendirinya akan maju, dan tidak ada lagi rakyat yang jatuh melarat!” (Nur, 2016:143).

Dalam kalimat *bukan ekonomi rakyat yang perlu kami pikirkan, tapi yang paling penting di atas segala-galanya adalah perjuangan untuk pengesahan bendera merah*, bagi Partai Merah yang paling penting bukan masalah ekonomi rakyat, namun yang diatas segala-galanya adalah perjuangan untuk menegakkan bendera merah agar terus berkibar dan menjadi dominasi di Aceh. Mereka berpikiran bahwa bendera adalah simbol segala-galanya, apabila bendera berkibar, maka perekonomian dan kesejahteraan akan maju dengan sendirinya. Strategi tersebut digunakan oleh Partai Merah untuk terus mengeksistensikan keberadaan mereka, dengan terus mengibarkan bendera merah dan mengajak rakyat untuk menjadi anggota Partai Merah.

“Kalian semua diberkahi Tuhan, karena telah bersumpah memberikan suara untuk partai-Nya. Suara kalian adalah perjuangan fi sabilillah, yang pahalanya sangat besar!” (Nur, 2016:146).

Kalimat *kalian semua diberkahi Tuhan, karena telah bersumpah memberikan suara untuk partai-Nya*. Partai Merah secara diam-diam pada saat kampanye melakukan sumpah untuk memberikan suara pada Partai Merah, yang mereka sebut sendiri sebagai partai Tuhan. Strategi sumpah memang tidak banyak orang yang percaya, namun dalam islam, sumpah merupakan salah satu hal yang sacral, sehingga harus ditepati apabila telah disumpah. Hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang Partai Merah untuk mendapatkan suara terbanyak dengan mengambil sumpah orang-orang yang dating dalam kampanye agar saat pemilihan dewan nanti, banyak rakyat Aceh yang memilih Partai Merah.

“Mana sempat mereka memikirkan kita. Hanya orang-orang Partai Merah-lah yang peduli, yang membawa misi agama Tuhan, demi kejayaan tanah mulia ini,; tanah yang telah melahirkan aulia dan ulama hebat di masa lalu!” (Nur, 2016:145).

Berdasarkan kalimat *tanah yang telah melahirkan aulia dan ulama hebat di masa lalu* menyatakan bahwa Aceh dijuluki sebagai Kota Serambi Mekkah, sehingga banyak aulia dan ulama yang terlahir dari Kota Aceh. Strategi politik Partai Merah untuk menarik simpati rakyat juga memanfaatkan nama aulia dan ulama terdahulu. Mereka beranggapan apabila aulia ayau ulama dibawa-bawa dalam kampanye, seakan-akan Partai Merah peduli terhadap wakil Allah yaitu *waliyullah*. Mereka juga mengandalkan strategi politik egoism yaitu dengan mengatakan bahwa hanya partai merah yang peduli tergadap agama Tuhan dengan embel-embel untuk kejayaan tanah mulia ini yaitu Tanah Surga Merah.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan, dapat disimpulkan bahwa (1) fakta-fakta politik lokal dalam novel *Tanah Surga Merah* Karya Arafat Nur ditemukan adanya dominasi Partai Merah; siasat egoisme partai politik; menuhankan uang dalam setiap alur yang diceritakan. Dalam penelitian ini ditemukan tiga fakta politik lokal yang ada dalam novel *Tanah Surga* mengindikasikan bahwa sistem perpolitikan di Aceh masih terpaku pada kekuasaan tunggal dari partai yang mendominasi dengan sistem egoisme hanya kepentingan materi saja yang menjadi tujuan utama bukan kepentingan rakyat; (2) strategi partai merah untuk memenangkan suara rakyat aceh dalam pemilihan umum dewan ditemukan bahwa dalam alur politik masih saja dilakukan strategi politik uang; strategi politik adu domba; strategi politik muslihat; strategi janji-janji palsu; strategi simpati dengan membawa nama agama, syariat Islam, aulia, dan ulama; pembacaan sumpah pemilihan; kampanye ilegal. Berdasarkan tiga fakta politik lokal Aceh dan tujuh strategi untuk menarik simpati rakyat dapat disimpulkan bahwa mereka hanya memiliki satu tujuan utama yaitu memenangkan pemilihan umum dengan melakukan segala macam cara agar tujuan tersebut dapat tercapai sesuai dengan kehendak partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Ahyar. 2015. *Teori Sosial Sastra*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Bahrum, Syamsuddin. 2016. *Dinamika Partai Politik Lokal*. Al-Lubb, Vol.1, No.1, 2016:134-161
- Damono, Sapardi Djoko. 2010. *Bilang Begini, Maksudnwrya Begitu.*: Buku Apresiasi Puisi. Jakarta: PT. Gramedia
- Faruk. 2015. *Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme (Cetakan IV)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Feisal, Akbar dan Mujibussalim.2017. *Eksistensi Partai Politik Lokal di Aceh (Suatu Kajian Terhadap Partai Daulat Aceh Pada Tahun 2009)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah. Volume 2, Nomor 2:230-247 Juli 2017.
- Hamid, Abdul. 2013. *Memetakan Aktor Politik Lokal Banten Pasca Orde Baru: Studi Kasus Kiai dan Jawara di Banten*. Jurnal Ilmu Politik1 (2), 32-45.
- Haniya. Syirwan. 2016. *Persepsi Tokoh Mahasiswa Terhadap Partai Aceh (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Syiah Kuala)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah. Vol 2, No 1.
- Khasanah, Uswatun. 2018. *Konflik Politik Dalam Novel Tanah Surga Merah Karya Arafat Nur dan Implementasinya Dalam Pembelajaran Novel Berdasarkan K13 Revisi 2017 Di Ma Bilingual Batu*. NOSI Volume 6, Nomor 1 Februari 2018.
- Nur, Arafat. 2016. *Tanah Surga Merah*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiarti. 2015. *Politik Lokal dalam Novel Jatisaba Karya Ramayda Akmal*. ISBN: 978-602-361-004-4.
- Sugiarti. 2016. *Kesadaran Ketuhanan Tokoh Utama Dalam Kumpulan Cerpen Ketika Mas Gagah Pergi dan Kembali Karya Helvy Tianarosa*. Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, April 2016. Volume 2, Nomor 1, hlm 90-97.